

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Harta Karun Bawah Laut**

Berbagai catatan dan dokumen sejarah menyebutkan, bahwa sejak abad ke-7 hingga abad ke-19 perairan Nusantara telah menjadi kuburan bagi bangkai kapal-kapal yang tenggelam. Mereka berasal dari kapal-kapal dagang Cina (dari berbagai dinasti), kapal-kapal Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Jepang. Serta kapal-kapal lainnya. Sudah ribuan kapal mengalami nasib buruk sampai akhirnya karam karena berbagai sebab, seperti tak kuasa menghadapi badai dan cuaca buruk kurangnya pengetahuan navigasi geografis pelayaran sehingga kapal menabrak karang dan lain sebagainya.

Kapal-kapal karam berikut muatannya yang dikenal sebagai Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) atau biasanya diistilahkan oleh masyarakat sebagai "Harta Karun Bawah Laut" Benda berharga tersebut disebut juga sebagai cagar budaya bawah laut dan menjadi milik Negara yang menguasai wilayah tersebut. Dalam pengertian yang luas, warisan budaya diartikan sebagai benda-benda artistik, sastra, arsitektural, bersejarah, arkeologikal, etnologikal, pengetahuan atau teknologi baik bergerak dan tidak bergerak yang mewujudkan nilai suatu bangsa<sup>10</sup>.

- a. Menurut Keppres 107 Tahun 2000, Pasal I ayat I dan 2, BMKT adalah benda-benda berharga yang berasal dari semua kapal yang tenggelam di wilayah perairan territorial Indonesia, ZEE, dan Landas Kontinen Indonesia yang mempunyai umur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, mempunyai nilai sejarah ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan nilai ekonomi yang tinggi<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

<sup>11</sup>Keppres Nomor 107 Tahun 2000, Pasal 1 ayat 1 dan 2

b. Sedangkan dalam perspektif hukum internasional sebagaimana dalam Pasal I Konvensi 2001 UNESCO mengenai perlindungan warisan budaya bawah air yaitu *Convention On The Protection Of Underwater Cultural Heritage* menyebutkan beberapa syarat sebuah benda dapat dikategorikan sebagai warisan budaya bawah air, yaitu:

1. Situs, struktur, bangunan, artefak dan sisa-sisa manusia, bersama-sama dengan konteks arkeologi dan alam.
2. Kapal, pesawat terbang, kendaraan lain atau bagiannya, kargo atau isi lainnya.
3. Objek karakter prasejarah<sup>12</sup>.

c. Di dalam ilmu Fiqih Islam, Harta Karun atau harta terpendam dikenal dengan istilah *Ar-Rikaz*, *Ar-Rikaz* secara bahasa artinya adalah sesuatu yang terpendam di dalam perut bumi berupa barang tambang atau harta terpendam. Sedangkan menurut pengertian syar'i, ialah harta terpendam zaman jahiliyah yang didapatkan tanpa mengeluarkan biaya dan kerja keras, baik berupa emas, perak, maupun selainnya. Sedangkan menurut pengertian syar'i, ialah segala sesuatu yang keluar dari bumi yang tercipta di dalam bumi dari sesuatu yang lain yang memiliki nilai. *Rikaz* adalah harta yang tertimbun di dalam tanah, baik berupa perak, emas, permata, mutiara dan lainnya, berupa perhiasan atau senjata. Baik itu adalah timbunan milik kaum-kaum terdahulu seperti Mesir kuno, Babilonia, Asyuriyin, Sasaniyin, Romawi kuno, Yunani kuno, dan selain mereka, seperti mata uang, perhiasan, permata yang ada di kuburan-kuburan raja-raja dan para pembesar mereka. Atau di reruntuhan kota kuno yang hancur, baik berupa mata uang, emas, perak, ditempatkan di bejana atau

---

<sup>12</sup>Convention On The Protection OF Underwater Cultural Heritage.

lainnya. Harta rikaz adalah harta yang ditemukan dari dalam perut bumi dan merupakan peninggalan dari umat sebelumnya yang tidak diketahui secara pasti<sup>13</sup>.

- d. Menurut penulis, harta benda bawah laut merupakan Benda cagar budaya bawah air adalah harta yang terpendam di bawah tanah maupun dasar laut yang berumur lebih dari 50 tahun memiliki nilai sebagai sumber pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pariwisata juga merupakan tinggalan yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu perlu dilestarikan dengan cara perlindungan, penyelamatan, pemeliharaan, dan pengawasan secara tepat dan layak sehingga aset strategis tersebut dapat bermanfaat secara tepat dan layak dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

## **B. Dasar Hukum Terkait Harta Bawah Laut**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai perairan cukup luas dengan dua pertiga wilayahnya merupakan lautan dan sepertiganya daratan yang terdiri dari 17.508 pulau dengan panjang pantai + 81.000 km, oleh karena itu dibutuhkan seperangkat aturan hukum yang memadai dalam pengelolaan laut yang sangat luas tersebut.

### **a. Menurut Hukum Internasional**

1. Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982), mengamanatkan negara pihak yang memiliki warisan budaya bawah laut untuk melindunginya.
2. Konvensi Internasional Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air Tahun 2001
3. Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut

---

<sup>13</sup> Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqih, Jakarta: Prenada Media, 2003, hal. 46.

b. Menurut Hukum Poitif

1. UUD 1945, Pasal 33 Ayat 3: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
3. (UU No, 5 Tahun 1992 Pasal 12), ( 1 ) Setiap orang dilarang fliencarr benda cagar budaya atau benda berharga yang tldak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan atau dengan cara pencarian lainnya, tanpa izin dari Pemerintah, (2) Ketentuan mengenai pencarian benda cagar budaya atau berharga yang tidak diketahui pemiliknya termasuk syarat-syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
4. UU Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
5. UU No. 17 Tabun 1985 tentang Hukum Laut (Ratifikasi UCLOS)
6. (UU No, I I Tahun 2010 Pasal 26), (1 ) Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan / atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya; (2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan Oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan / atau pengangkatan di darat dan / atau di air.
7. UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 18: (1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya di laut; (2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan,/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundangan.
8. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

9. Keppres No. 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan Dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam.
10. PP Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik pangkal.
11. KepMen-KP selaku Ketua Panitia Nasional BNKT Nomor 39 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Perizinan Survei dan Pengangkatan BMKT.

c. Menurut Hukum Islam

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَسِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
ضِيَالَهُ عَنْ نَرَسُوٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَجْمَاءِ جُبَارٍ وَالْبُرِّ جُبَارٍ وَالْمَعْدِ جُبَارٍ وَفِي الرِّكَازِ الْحُمْ

سُ

*Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Yusuf] telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Ibnu Syihab] dari [Sa'id bin Al Musayab] dan dari [Abu Salamah bin 'Abdurrahman] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu]; bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Binatang gembalaan yang mencelakai tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya), begitu juga menggali sumur dan mencelakai, tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya) dan menggali barang tanbang dan mencelakai, tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya). Sedangkan harta terpendam (bila ditemukan seseorang) zakatnya seperlima"<sup>14</sup>.*

### C. Pengelolaan Harta Bawah Laut di Indonesia

Hilang atau rusaknya benda cagar budaya merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki oleh pemilik atau yang menguasainya apabila terbukti bukan kesengajaan atau perbuatan karena niat. Disini tampak adanya unsur ketidakadilan terhadap pemilik atau yang menguasai benda cagar budaya.

a. Panitia Nasiona BMKT

<sup>14</sup>Sahih Bukhari No. 1499

Panitia Nasional Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (PANNAS BMKT) awalnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 43

Tahun 1998 yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam). Kemudian pada Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dirubah melalui Keppres No. 107 Tahun 2000 tentang PANNAS BMKT, diketuai oleh Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan, atau kini menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keppres No, 19 Tahun 2007. Sejalan dengan perkembangan dinamika pengelolaan dan pengawasan BMKT berikut kompleksitas terkait ijin survei dan ijin pengangkatan, pemilihan status koleksi negara, penjualan selain koleksi negara, sampai dengan sertifikasi dan pemindah tanganan BMKT baik ke pembeli dalam negeri maupun ke luar wilayah RI jika dimiliki oleh pihak asing, maka selalu terdapat penyesuaian.

Menurut Keppres No. 107 Tahun 2000, dalam pasal 2 menyebutkan bahwa "Panitia Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden" Dalam Pasal 7, masalah pembiayaan Pannas BMKT disebutkan sebagai berikut: "Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Panitia Nasional dibebankan kepada anggaran Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku" Sedangkan dalam Pasal 8 Keppres No 107 Tahun 2000 disebutkan bahwa: "Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan membentuk Tim Teknis dan menyusun ketentuan teknis sebagai pelaksan lebih lanjut dari keputusan Presiden ini".

Sedangkan tugas pokok panitia nasional itu sendiri sebagaimana dlentukan Pasal 3 Keppres 107 Tahun 2000 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan BMKT adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan departemen dan instansi lain yang terkait dengan pengangkatan, pengangkutan serta pemanfaatan.
2. Menyiapkan peraturan perundangan di bidang pengangkatan dan pemanfaatan.
3. Meyiapkan pembentukan badan pengelola pengangkatan dan pemanfaatan.
4. Memberikan rekomendasi terhadap izin pengangkatan dan pemanfaatan kepada pejabat berwenang sesuai peraturan yang berwenang.
5. Menyelenggarakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian atas proses pengangkatan, pengangkutan dan pemanfaatan<sup>15</sup>.

Susun Panitia Nasional BMKT adalh sebagai beikut:

Ketua : Mentri Eksplorasi Laut dan Perikanan

Waket I : Mentri Pendidikan Nasional

Waket II : Kasal

1. Sekretaris I merangkap Anggota sekaligus sebagai pelaksana harian: Direktur Jenderal Penyerasian Riset dan Eksplorasi Laut, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan.
2. Sekretaris merangkap Anggota: Direktur Jenderal kebudayaan, Departemen Pendidikan Nasional.
3. Anggota.
  - Sekjen Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan.
  - Direktur Jenderal dari Departemen Pertahanan.
  - Direktur Jenderal dari Depdagri.

---

<sup>15</sup>Keppres Nomor 107 Tahun 2000.

- Direktur Jenderal dari Departemen Luar Negeri.
- Dirjen dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan
- Direktur jendral dari Departemen Keuangan.
- Direktur jendral dari Departemen Perhubungan
- Direktur Jenderal dari Deperindag.
- ASOPS Kasal.
- Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, DKP.
- Ka. Biro Perairan Perundang-undangan.

Ketentuan Teknis Perizinan Survei dan Pengangkatan BMKT, pada pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa dalam perizinan survei dan perizinan pengangkatan benda berharga, Panitia Nasional BMKT mempunyai tugas, sebagai berikut:

- 1) Di bidang perizinan survei benda berharga.
  - a. Menilai permohonan izin survei yang diajukan Oleh perusahaan
  - b. Memberikan rekomendasi mengenai izin survei kepada pejabat yang berwenang.
  - c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dan Perusahaan pelaksana kegiatan survei.
  - d. Menyelenggarakan koordinasi antar instansi teknis.
- 2) Di bidang perizinan pengangkatan benda berharga
  - a. Menilai permohonan izin pengangkatan benda berharga yang diajukan Oleh perusahaan.
  - b. Memberikan rekomendasi mengenai izin pengangkatan benda berharga kepada pejabat yang berwenang



- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dan Perusahaan pelaksana kegiatan pengangkatan benda berharga.
  - d. Menilai benda hasil pengangkatan dan menentukan pemanfaatan atas benda-benda tersebut
  - e. Menyelenggarakan koordinasi antar instansi teknis
- b. Pengelolaan BMKT

Secara umum kondisi BMKT terbagi menjadi dua kategori, yaitu benda yang mudah lapuk atau rusak seperti kayu, tanah liat, kertas, dan lain sebagainya. Sementara benda yang tidak mudah rusak ialah emas, perak berlian batu mulia, keramik, porselen, mata uang koin serta benda berbahan non organik lainnya. Benda-benda inilah yang umumnya memiliki nilai ekonomi yang sulit diukur. Banyak variabel yang mempengaruhi nilai ekonominya. Antara lain nilai diluar fisik bendanya (nilai arkeologinya) seperti ruang, waktu serta bentuknya. Belum lagi nilai kelangkaannya serta cara mendapatkannya.

Direktorat Pesisir dan Lautan pada Ditjen KP-3-K Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Subdit Jasa Kelautan dan Kemaritiman di Tahun 2008 telah mengadakan inventarisasi dan kajian potensi kapal tenggelam untuk dijadikan sebagai objek wisata bahari di 6 daerah, yaitu Bangka Selatan, Biak, Barru, Selayar, Kepulauan Seribu dan Morotai. Potensi lokasi kapal tenggelam merupakan alternatif objek wisata bahari sebagai salah satu spot diving favorit di dunia, sekaligus bagian dari pengelolaan BMKT yakni kegiatan survei selain pengangkatan dan pemanfaatan. Survei adalah kegiatan mencari hingga mengidentifikasi keberadaan dan potensi BNKT, pengangkatan adalah kegiatan mengangkat dari bawah air, memindahkan, menyimpan, inventarisasi,

dan konservasi BMKT dari lokasi asal penemuan ke tempat penyimpanannya, serta pemanfaatan adalah kegiatan yang meliputi penjualan kepada pihak ketiga dan pemanfaatan lain untuk Pemerintah.

c. Pengawasan BMKT

Pengawasan merupakan aktivitas yang dilakukan guna menjaga dan menghindari terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Pengawasan dilakukan mulai dari survei, pengangkatan hingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara baik dan benar pengelolaan dan pengawasan tersebut dilakukan oleh pihak Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan BMKT telah meliputi:

- 1) Pengawasan administrasi, terkait dengan kelengkapan dokumen serta sarana dan prasarana;
- 2) Pengawasan teknis, yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan survei, pengangkatan, atau pemanfaatan BMKT;
- 3) Pengawasan melalui gelar operasi di laut. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing instansi yang merupakan unsur pengawas BMKT yakni Ditjen PSDKP, TNI AL, POLRI, Kemenbudpar,
- 4) maupun secara terpadu melibatkan semua unsur pengawas yang dikoordinasikan oleh PANNAS BMKT.

d. Pemanfaatan BMKT

Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan terdapat tiga aliran pemanfaatan BMKT yang menerangkan kondisi bagaimana negara menyikapi

pemanfaatan keberadaan kapal tenggelam, termasuk muatan benda berharganya adalah sebagai berikut:

- 1) Aliran Negara yang memanfaatkan BMKT sebagai sumber ekonomi.
- 2) Aliran Negara yang mendukung sepenuhnya BMKT sebagai salah satu subyek, sekaligus obyek yang dilestarikan dan dianjurkan hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan (terutama arkeologi dan sejarah) dan atau sebagai obyek wisata bawah air.
- 3) Aliran Negara (termasuk Indonesia), yang mengambil jalan tengah, yaitu memanfaatkan BMKT sebagai sumber devisa Negara, tanpa mengabaikan kepentingan BMKT sebagai subyek dan obyek ilmu pengetahuan dan sejarah/arkeologi kelautan Indonesia<sup>16</sup>.

Menurut perundangan dan PANNAS, BMKT yang telah diangkat dari (dasar) laut serta telah dinilai dengan kriteria tertentu dan ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, harus dimiliki oleh Pemerintah sebagai Barang Milik Negara (BMN). Bisa dikatakan bahwa barang tertentu yang dimaksud adalah barang yang memiliki nilai sejarah yang berkaitan dengan bangsa dan Negara Indonesia, atau barang sejarah yang memiliki nilai edukasi yang tinggi bagi pengembangan pendidikan dan kebudayaan sehingga ditetapkan sebagai Barang milik Negara.

Sedangkan BMKT lainnya dikategorikan sebagai “BMKT berstatus selain BMN yang dapat dijual untuk meningkatkan pendapatan negara. BMKT berstatus selain BMN yang ditetapkan oleh Kemenbudpar harus diusulkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua PANNAS BMKT kepada Menteri Keuangan untuk penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Status

---

<sup>16</sup>[www.dkp.org](http://www.dkp.org) diakses pada tanggal 10 februari 2015 jam 13.30

Penggunaan BMKT berstatus selain BMN, untuk pelaksanaan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Hasil penjualan BMKT berstatus selain BMN melalui lelang setelah dipungut bea lelang, akan diserahkan kepada pemohon lelang yakni Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua PANNAS BMKT, untuk bagian Pemerintah wajib disetorkan ke Kas Negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Akan tetapi, pemanfaatan benda berharga perlu mendapat pengawasan yang ketat dari pemerintah agar supaya pemanfaatannya tidak cenderung memberi dampak negatif terhadap pemusnahan data sejarah budaya/arkeologi yang ada di laut.

#### **D. Batas Wilayah Laut Teritorial**

Dalam Pasal 25 A UUD 1945 disebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia juga disebutkan bahwa, “Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan” Negara Indonesia terbentuk dari konfigurasi pulau-pulau yang berjumlah sekitar 17.508, dengan garis pantai sepanjang 81 ,000 km dan luas laut sekitar 5,8 juta km, memiliki ekosistem laut yang sangat strategis dan dapat dikelola untuk menjadi andalan pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam kemaritiman. Dengan garis pantai sepanjang itu, berarti Indonesia memiliki wilayah teritorial yang sangat luas. Keluasan wilayah teritorial laut ini merupakan anugerah yang sangat besar, yang di dalamnya mengandung sumber daya alam di lautan yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Dasar laut dan tanah di bawah daerah laut teritorial sudah termasuk kedaulatan negara pantai, karena laut di wilayah teritorial merupakan bagian integral dari wilayahnya. Konsep kedaulatan teritorial berarti Negara memiliki kewenangan penuh untuk memiliki dan mengelola segala sumberdaya alam dan kekayaan yang terdapat diwilayah tersebut. Sebagai bagian integral dan bagian dari yurisdiksi negara Indonesia, terhadap wilayah laut teritorial itu Pemerintah Indonesi memiliki kedaulatan untuk memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya alam di lautan, termasuk melakukan konservasi.

Meskipun Indonesia memiliki kedaulatan teritorial laut, namun juga berbatasan dengan negara-negara tetangga atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan wilayah teritorial laut Indonesia. Hal ini berarti bahwa dalam memanfaatkan sumber daya laut di wilayah teritorial Indonesia untuk menopang tujuan negara tersebut di atas, Pemerintah Indonesia juga harus menghormati atau memberikan hak kepada negara-negara lain untuk menggunakan wilayah teritorial Indonesia seperti untuk lalu lintas damai (innocent passage). Negara pantai seperti halnya Indonesia dikelilingi oleh laut, yang secara umum terdiri dari laut territorial, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas. Secara garis besar beberapa jenis laut ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

a. Laut Territorial

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut batas territorial yang disepakati adalah 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas territorial di sebut laut territorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut

internal. Garis dasar adalah garis yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau. Suatu negara mempunyai hak kedaulatan penuh atas laut teritorial, dan mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Bagi Indonesia, ada pengumuman pemerintah tentang wilayah laut teritorial yang dikeluarkan tanggal 13 Desember 1957. Hal ini dikenal dengan Deklarasi Djuanda yang kemudian diperkuat dengan Undang-undang No.4 Prp. 1960. Setelah ada United Nations Convention on the Law of Sea (UNCLOS) 1982, Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut dengan UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)<sup>17</sup>.

b. Landas Kontinen

Landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Batas landas kontinen diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara.

c. Laut Lepas

Laut lepas adalah laut yang tidak termasuk ke dalam wilayah laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan landas kontinen. Laut lepas terbuka bagi semua negara, baik negara yang berpantai maupun yang tidak berpantai, dan kebebasan di laut lepas ini antara

---

<sup>17</sup>UU NO. 17 Tahun 1985.

lain adalah (a) kebebasan berlayar; (b) kebebasan untuk terbang di atasnya; (c) kebebasan untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut; (d) kebebasan untuk membangun pulau-pulau buatan dan instalasi-instalasi lainnya; (e) kebebasan menangkap ikan; dan (f) kebebasan untuk melaksanakan riset ilmiah.

d. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut bahwa masing-masing negara pantai memiliki hak pada zona ekonomi eksklusif sebagai berikut:

- 1) Hak berdaulat (*souvereign rights*) untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengurusan sumber kekayaan alam hayati atau non-hayati dari perairan, dasar laut dan tanah bawah;
- 2) Hak berdaulat (*souvereign rights*) atas kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi seperti produksi energi dari air dan angin;
- 3) Yurisdiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pembinaan dari lingkungan maritim<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup>UU No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEE Indonesia